

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1) Pengertian pariwisata

Pengertian pariwisata secara etimologi kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu kata “pari” yang berarti banyak; berkali-kali; berputar-putar, kata “wisata” yang berarti perjalanan; bepergian. Pariwisata dalam bahasa Inggris adalah “tour” yang diartikan dalam kamus sebagai : perjalanan atau bepergian untuk kesenangan mengunjungi berbagai tempat yang menarik, atau kunjungan singkat, atau kunjungan lewat suatu tempat (Spillane, 2001:22).

Pengertian pariwisata menurut undang-undang Nomor 9 tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Menurut Cooper dalam Heriawan (2004), pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting , yaitu:

perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya. Heriawan (2004) mengomentari uraian tersebut memiliki pengertian bahwa tidak semua orang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan . dengan kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (*leisure*) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.

Yoeti (1997:12) menjelaskan pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan maksud bukan untuk urusan bisnis atau mencari nafkah ditempat yang akan dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan berekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Yoeti (1997) ada tiga alasan mengapa pariwisata perlu untuk dikembangkan, yang pertama, bahwa pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik lokal, regional maupun nasional pada suatu negara erat kaitannya dengan pengembangan perekonomian daerah tersebut. Dengan kata lain, pembangunan suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Alasan kedua lebih banyak bersifat non ekonomis. Wisatawan yang berkunjung kedaerah wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam, tempat bersejarah, candi dan

bangunan kuno. Alasan ketiga adalah untuk menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian dan mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung terutama bagi masyarakat dimana proyek itu dibangun (Yoeti 1997:34).

2) Definisi wisatawan

Wisatawan (*tourism*) yaitu seorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata, jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Namun apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut pelancong (*excursionist*) (Suwanto.2004).

Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9/1969 yang tertulis dalam bab 1 pasal 1, wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ketempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu (Spillane.2001).

Menurut Spillane, wisatawan ialah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam dinegara yang dikunjungi dan kunjungan perjalanannya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pesiari yaitu untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, dan olah raga.
- b. Hubungan dagang, sanak keluarga, handai taulan, konferensi, dan misi.

Wisatawan pada umumnya yaitu sekelompok orang yang berkunjung disuatu daerah untuk melakukan suatu perjalanan wisata, namun tidak untuk tinggal didaerah tujuan tersebut maupun bekerja untuk mendapatkan upah.

3) Peran Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis, dan aspek-aspek yang lainnya. Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian paling besardan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.

Pengembangan didalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat lebih dapat berperan atau ikut serta secara aktif. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.

Pembangunan disektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendaya gunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan

kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.

Menurut Hutabarat (1992), peranan pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, peranan ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, peranan sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah peranan kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian.

Ketiga point diatas dapat diperjelaskan, yaitu sebagai berikut:

a. Peran ekonomi

- ✓ Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderama, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

- ✓ Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan

wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat ersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-lainnya. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

b. Peran Sosial

✓ Semakin luasnya lapangan kerja

Saran dan prasarana seperti hotel, restoran, dan perusahaaan perjalanan adalah usaha-usaha yang padat karya. Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan berkunjung, makin banyak pula lapang kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

c. Peran kebudayaan

✓ Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.

Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh

karena itu, penyembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

- ✓ Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup.

Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau, panatai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.

- ✓ Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli. Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

Ciri-ciri wisatawan adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang melakukan perjalanan dan keluar meninggalkan tempat tinggalnya.
2. Perjalanan itu dilakukan jauh dari lingkungan tempat tinggalnya yang semula.
3. Perjalanan itu dilakukan sendirian atau bersama-sama dengan orang lain.
4. Perjalanan itu dilakukan hanya untuk sementara waktu dan bisa melebihi waktu 24 jam atau sehari-semalam penuh.
5. Perjalanan itu terkait dengan kegiatan atau rekreasi, atau usaha menyenangkan dirinya.

6. Orang-orang yang melakukan perjalanan tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi.
7. Selama dalam perjalanan tinggal di suatu tempat/akomodasi.
8. Dalam melakukan perjalanan, melalui alat transportasi laut, darat atau udara.

Secara teoritis dalam Austriana (2005) semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah juga akan semakin meningkat. Secara sederhana konsumsi sektor pariwisata merupakan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) selama tinggal di Daerah Tujuan Wisata yang dikunjunginya mulai dari paket perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, rekreasi budaya dan olahraga, belanja, dan lain-lain.

4) Objek Pariwisata

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya tarik, baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan

fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monument-monument, candi-candi, tari-tarian dan kebudayaan khas lainnya(Adisasmita, 2010).

Suatu objek wisata menurut Yoeti(1992) harus memenuhi tiga persyaratan:

- a. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “*something to see*” (sesuatu untuk dilihat). Artinya, ditempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain (pemandangan alam, upacara adat dan kesenian) yang dapat dilihat oleh wisatawan.
- b. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to do*” (sesuatu untuk dikerjakan). Artinya, ditempat tersebut tersedia tempat rekreasi yang membuat mereka betah untuk tinggal lebih lama ditempat itu(penginapan/hotel yang memadai, kolam renang, sepeda air) sehingga mereka dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dirumah ataupun ditempat wisata lainnya.
- c. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to buy*” (sesuatu untuk dibeli). Artinya, di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja(*shopping*), terutama souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.

Dilihat dari perspektif kehidupan masyarakat, objek wisata perdesaan merupakan suatu bentuk pariwisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama lamnya dan budayanya khususnya wisatawan

asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek sekaligus juga sebagai subyek dari kepariwisataan. Sebagai suatu objek maksudnya adalah bahwa kehidupan pedesaan merupakan tujuan bagi kegiatan wisata, sedangkan sebagai subyek adalah bahwa desa dengan segala aktivitas sosial budayanya merupakan penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kepariwisataan dan apa yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung.

Oleh karena itu, peran aktif dari masyarakat sangat menentukan kelangsungan kegiatan objek wisata pedesaan. Sutrisno (2013) menyimpulkan bahwa banyaknya jumlah objek wisata yang ada, maka dapat meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di Jawa Tengah, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.

Sujali (1989) mengemukakan bahwa bahan dasar yang perlu dimiliki oleh industri pariwisata dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- ✓ Objek wisata alam (*natural resources*) : bentuk dari objek ini berupa pemandangan alam seperti pegunungan, pantai, flora dan fauna atau bentuk yang lain.
- ✓ Objek wisata budaya atau manusia (*human resources*) : objek ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan/kehidupan manusia seperti museum, candi, kesenian, upacara keagamaan, upacara adat, upacara pemakaman atau bentuk yang lainnya.

- ✓ Objek wisata buatan manusia (*man made resources*) : objek ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia sehingga bentuknya tergantung pada kreativitas manusianya seperti tempat ibadah, alat musik, museum, kawasan wisata lainnya.

5) Usaha pariwisata dan sarana pendukung

adalah penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, angkutan wisata, sarana wisata, dan kawasan pariwisata. Termasuk didalamnya semua fasilitas atau kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dan menikmati perjalanan wisatanya, serta memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam.

Menurut Roerkaerts dan Savat dalam Spillane (1987) yang menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, seperti penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah itu sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD.

Sarana pariwisata dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Sarana pokok pariwisata

Sarana pokok pariwisata adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan.

2. Sarana pelengkap pariwisata

Sarana pelengkap pariwisata adalah perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi dan tujuan wisata.

3. Sarana penunjang pariwisata

Sarana penunjang pariwisata adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok yang berfungsi untuk membuat wisatawan betah di daerah tujuan wisata.

Ada pun jenis usaha pariwisata antara lain :

- 1) Usaha daya tarik wisata : usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, budaya, dan wisata buatan.
- 2) Usaha kawasan pariwisata : usaha pembangunan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Usaha jasa transportasi pariwisata : usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- 4) Usaha jasa perjalan wisata :

- Biro perjalan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
 - Agen perjalan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- 5) Usaha jasa makanan dan minuman : usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian.
 - 6) Usaha penyediaan akomodasi : usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
 - 7) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi : usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
 - 8) Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalan insentif, konferensi dan pameran : pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi

dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

- 9) Usaha jasa informasi pariwisata : usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- 10) Usaha jasa konsultan pariwisata : usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

6) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Koswara (2000:50) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan Negara Menurut Mahi (2000:58-59) Pendapatan Asli Daerah masih belum bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan dalam mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

- 1) Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah.
- 2) Peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.
- 3) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.
- 4) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Ketidakmampuan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan disebabkan karena selama ini pemerintah belum mampu untuk menggali dan mengembangkan sumber sumber penerimaan yang terdapat di daerahnya. Hal tersebut terlihat banyaknya potensi penerimaan daerah yang belum digali dan dipungut sebagaimana mestinya. Selama ini daerah dalam pemungutan sumber penerimaan daerah menggunakan sistem “target” yang hendak dicapai dalam pemungutan. Target yang ditetapkan

oleh daerah cenderung tidak berdasarkan pada potensi riil yang terdapat di daerah, melainkan berdasarkan pada target tahun lalu ditambah dengan tunggakan tahun tersebut.

Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan di daerah. Menurut Mardiasmo (2002:146) masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap.
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi)
5. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil

Sumber pendapatan asli daerah

a) pajak daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184).

Menurut Ahmad Yani (2004 :40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d) Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian yang telah dilakukan mengenai objek wisata antara lain:

Tabel 2.1 penelitian terdahulu mengenai objek wisata

NO	PENULIS JUDUL	VARIABEL	METODE	KESIMPULAN	APLIKASI PENELITI
1.	Wayan Gede Sedana Putra (2011) Judul “Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan retribusi obyek wisata, pendapatan asli daerah, dan anggaran pembangunan Kabupaten Gianyar tahun 1991-2010”.	Retribusi obyek wisata, pendapatan asli daerah, anggaran pembangunan dan jumlah kunjungan wisatawan.	Primer dan sekunder	Secara keseluruhan variabel retribusi obyek wisata dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pembangunan daerah, hanya variabel jumlah kunjungan wisatawan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pembangunan.	pendapatan asli daerah dan jumlah kunjungan wisatawan.
2.	Famytyas Sri Yani Kusumastut (2014) Judul “Peranan sektor pariwisata	Sektor pariwisata, input output, permintaan terakhir, multi player effect.	Input output	Berdasarkan analisis data, sektor pariwisata Indonesia memiliki nilai keterkaitan kebelakang yang lebih	Sektor pariwisata.

	dalam perekonomian indonesia”			besar dari pada keterkaitan kedepannya. Lalu pada analisa koefisien penyebaran, didapat bahwa tiga dari sub sektor pariwisata (sub sektor pariwisata jasa restoran, jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan, dan jasa angkutan udara)memiliki nilai koefisien penyebaran yang lebih besar dari satu.	
3.	Achadiat Dritasto, Annisa Ayu Angreini (2013) Judul “Analisis dampak ekonomi wisata bahari terhadap pendapatan masyarakat dipulau Tidung”.	Pulau Tidung, dampak ekonomi, kegiatan wisata, efek multiplier.	Sekunder , kuantitati f.	Secara umum kegiatan wisata yang ada di Pulau Tidung telah memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat walaupun dampak yang dirasakan terbilang cukup kecil. Dampak ekonomi ini terjadi karena perputaran uang antara wisatawan, unit usaha, dan	Dampak ekonomi dan kegiatan wisata.

				tenaga kerja.	
4.	Nasrul Qadarrochman (2010) Judul “Analisis penerimaan daerah dari sektor pariwisata di kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya”.	Penerimaan daerah sektor pariwisata , jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita.	sekunder	Dari keempat variabel yang di analisis yaitu variabel jumlah obyek wisata, variabel jumlah wisatawan, dan variabel tingkat hunian hotel dinyatakan signifikan semua, sementara variabel pendapatan per kapita berpengaruh tidak signifikan.	Jumlah obyek wisata dan jumlah wisatawan.
5.	Supriyanto (2009) Judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Wonogiri periode 2001-2008”.	Jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan dinas pariwisata, kontribusi sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi.	Sekunder	Perkembangan pendapatan pariwisata cenderung meningkat, jumlah wisatawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya pendapatan dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Wonogiri. Biaya pengelolaan pariwisata mempunyai pengaruh yang	Jumlah kunjungan wisatawan.

				signifikan terhadap pendapatan dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Wonogiri.	
6.	Juliafitri Dj. Gafur (2005) judul” Analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kota Bitung”.	PAD (pajak dan retribusi), obyek wisata, hotel, restoran, dan hiburan.	Regresi linier berganda	Adanya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kota Bitung sebesar 0,36% yang berarti kontribusi masih sangat minim.	Pendapatan asli daerah dan obyek wisata.

Oleh karena itu, sebagai peneliti saya meneliti tentang Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah usaha Pariwisata dan Sarana Pendukung, dan Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2008-2015.

C. HIPOTESIS

1. H_0 = Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/kota di Provinsi DIY.

H_1 = Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/kota di Provinsi DIY.

2. H_0 = Jumlah usaha pariwisata dan sarana pendukung tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/kota di Provinsi DIY.

H_1 = Jumlah usaha pariwisata dan sarana pendukung berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/kota di Provinsi DIY.

3. H_0 = Jumlah obyek wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten /kota di Provinsi DIY.

H_1 = Jumlah obyek wisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten /kota di Provinsi DIY.

D. MODEL PENELITIAN

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

